

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KAIMANA**

Fahriansyah Syam

NPP: 29.1875

*Asdaf Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email: Fahriansyahsyam25@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Very low regional financial independence and high dependence on the central government in Kaimana Regency became the background of this study. **Purpose:** This study aims to find out the level of regional financial independence in supporting the improvement of community welfare over the past 5 years as seen from the analysis of financial ratios and human development index levels. **Method:** The method used is qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation, semi-structured interviews and documentation. **Result:** The results showed that the level of financial independence of Kaimana Regency is still low in the last 5 years, namely from 2016-2020 with an average ratio of regional financial independence of 3.82%, the average ratio of the degree of regional financial dependence of 95.67%, the average degree of fiscal decentralization of 3.67%, the average effectiveness of regional native income management is 111.54% and the level of community welfare which is also still low with the average HDI of 63.63%. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, the local government needs to issue strategic efforts by empowering regional potential that can be used as a source of regional revenue so that it can support the implementation of regional autonomy which basically aims to improve the welfare of the community itself.

Keywords: Independence Analysis, Regional Finance, Community Welfare.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat di Kabupaten Kaimana menjadi latar belakang dari penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun terakhir yang dilihat dari analisis rasio keuangan dan tingkat indeks pembangunan manusia. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana masih rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 dengan rata-rata

rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga masih rendah dengan rata-rata IPM yaitu 63,63%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis tersebut pemerintah daerah perlu mengeluarkan upaya strategis dengan melakukan pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Analisis Kemandirian, Keuangan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan di daerah dan pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah otonom tersebut. Tetapi pada kenyataannya dilapangan masih sangat banyak daerah di Indonesia yang belum maksimal dalam menjalankan dan mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam bentuk otonomi daerah. Menghitung rasio keuangan meliputi: rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, dan rasio efektifitas PAD (Kawatu, 2019).

Rasio kemandirian daerah agregat se-Provinsi di Indonesia, daerah yang memiliki rasio tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan besaran rasio sebesar 66,4%, sedangkan yang memiliki rasio terkecil adalah Provinsi Papua Barat dengan besaran rasio 4,8% (Kementrian Keuangan, 2017). Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kaimana masih sangat rendah pada pelaksanaan otonomi jika dilihat pada Pendapatan Daerah pada struktur APBD 5 tahun terakhir sehingga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat juga masih sangat kurang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah (United Nations Development Programme). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kaimana pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berada pada angka rata-rata 63,63% (Badan Pusat Statistika Kabupaten Kaimana, 2020), namun nilai IPM tersebut masih berada di tingkat menengah kriteria penilaian Indeks Pembangunan Manusia yaitu $50 < IPM < 80$. Tentu saja pemerintah daerah Kabupaten Kaimana perlu memaksimalkan lagi perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Kaimana terutama di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, dengan didukung oleh kemandirian keuangan daerah dalam membiayai jalanya pemerintahan di Kabupaten Kaimana..

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kaimana. Beberapa faktornya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah serta pemanfaatan dan pengelolaan PAD yang belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana. Hal tersebut juga menandakan masih sangat bergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang rendah di Kabupaten Kaimana akan berdampak pada jalannya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan bahan acuan dan sumber referensi dalam melakukan sebuah penelitian, hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan pembandingan dan untuk memberikan inspirasi dengan topik penelitian yang hampir sama. Penelitian yang dilakukan Risky Sandroyto Pangaribuan berjudul Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara (Pangaribuan, 2020) Hasil penelitian tersebut yaitu: (1) Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Aceng Abdul Hamid menemukan bahwa terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan perkapita, terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kamilaus Konstase Oki, Frederic W. Nalle dan Pricilia A.V. Meomanu, berdasarkan penelitian tersebut tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu, penulis menemukan bahwa rasio desentralisasi fiskal kabupaten belu dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbeda dengan penelitian Oki dkk, pangaribuan dan Hamid yang menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini berfokus pada kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kemandirian keuangan yang mempunyai indikator yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisas dan rasio efektivitas pengelolaan PAD (Mahmudi, 2019). Dan juga peneliti melihat dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dinilai dengan indeks pembangunan manusia (*United Nations Development Programme*). Penulis mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kabupaten Kaimana, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya BAPPEDA, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA, Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan BAPPEDA, Anggota Staf Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD, Anggota Staf Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA dan 2 orang Masyarakat Kabupaten Kaimana. Adapun pengumpulan data sekunder melalui data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016-2020 serta data dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana menggunakan rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisas dan rasio efektivitas pengelolaan PAD dan melihat indeks pembangunan manusia serta bagaimana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Rasio Kemandirian Keuangan

Penulis melakukan pengukuran terhadap kemandirian keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Rasio kemandiran keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah PAD})}{\text{Transfer Pusat, Provinsi, Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	Sangat Kurang	Instruktif
Rendah	Kurang	Konsultif
Sedang	Cukup	Partisipatif
Tinggi	Sedang	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian	Keterangan
2016	49.037.440.645	971.196.744.777	5,04	Instruktif
2017	36.637.054.551	973.009.884.130	3,76	Instruktif
2018	40.589.189.654	961.554.182.487	4,22	Instruktif
2019	30.093.836.325	1.111.650.428.515	2,70	Instruktif
2020	34.133.173.442	1.009.832.915.457	3,38	Instruktif

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 2. Perhitungan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dari tahun 2016-2020, mengalami naik turun dan masih berada di angka presentase yang sangat rendah ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah yaitu dibawah 6% dan berada pada pola hubungan instruktif yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.2. Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio derajat tingkat ketergantungan keuangan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. Cara perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Presentasi penilaian terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.

Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase (%)	Kriteria Ketergantungan
00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup Rendah
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2016	971.185.914.587	1.020.234.185.422	95,19	Sangat Tinggi
2017	973.009.884.130	1.009.646.938.681	96,37	Sangat Tinggi
2018	961.554.182.487	1.002.143.372.141	95,94	Sangat Tinggi
2019	1.100.576.749.852	1.141.744.264.840	96,39	Sangat Tinggi
2020	980.590.639.978	1.043.966.088.899	93,95	Sangat Tinggi

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Kaimana mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase yang sangat tinggi yaitu lebih dari 90%. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kaimana masih sangat rendah.

3.3. Rasio Derajat Desentralisas

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio desentralisasi fiskal dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio desentralisasi fiskal daerah adalah:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.

Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Presentase (%)	Kriteria
00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Keterangan
2016	49.037.440.645	1.020.234.185.422	4,80	Sangat Kurang
2017	36.637.054.551	1.009.646.938.681	3,62	Sangat Kurang
2018	40.589.189.654	1.002.143.372.141	4,05	Sangat Kurang
2019	30.093.836.325	1.141.744.264.840	2,63	Sangat Kurang
2020	34.133.173.442	1.043.966.088.899	3,27	Sangat Kurang

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Kaimana mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase yang sangat rendah yaitu kurang dari 5%. Hal ini berarti bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendanai otonomi daerah masih sangat rendah.

3.4. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio efektivitas pengelolaan PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas PAD dapat dinilai dengan indikator kategori pada tabel berikut:

Tabel 7.

Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Presentase (%)	Kriteria
<75	Tidak Efektif
75 - 89	Kurang
90 - 99	Cukup
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan PAD daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8.**Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD Daerah Kabupaten Kaimana**

Tahun	Realisasi	Target	Rasio	Keterangan
	Penerimaan PAD	Penerimaan PAD	Efektivitas PAD	
2016	49.037.440.645	38.950.468.768	125,89	Sangat Efektif
2017	36.637.054.551	42.720.281.706	85,76	Kurang Efektif
2018	40.589.189.654	28.538.898.572	142,22	Sangat Efektif
2019	30.093.836.325	30.602.199.722	98,33	Efektif
2020	34.133.173.442	32.358.062.698	105,48	Sangat Efektif

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Perhitungan rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase yang sangat tinggi yaitu mempunyai rata-rata 111,54%. Hal tersebut dikategorikan sangat efektif itu berarti pemerintah daerah mampu meralisasikan penerimaan daerah yang telah direncanakan.

3.5. Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah di daerah dari aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Kaimana. Badan program pembangunan PBB (UNDP) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah. Yang mana indikator IPM terdiri dari tiga karakteristik utama pembangunan manusia. Indikator harapan hidup mewakili aspek kesehatan yang berarti memiliki rentang hidup yang panjang, indikator harapan lama sekolah dan panjang rata-rata sekolah mewakili aspek pendidikan, dan dimensi ekonomi yang berarti memiliki kehidupan yang layak dijelaskan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kriteria penilaian indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.**Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Manusia**

Nilai IPM	Tingkatan
< 50	Rendah
50 < IPM < 80	Menengah
> 80	Tinggi

Sumber: www.bps.go.id

Berikut ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kaimana selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2020:

Tabel 10.**Indeks Pembangunan Manusia Daerah Kabupaten Kaimana**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Keterangan
2016	62,15	Menengah
2017	62,74	Menengah
2018	63,67	Menengah
2019	64,59	Menengah
2020	65	Menengah

Sumber: diolah oleh penulis, BPS Kabupaten Kaimana, 2022

IPM di Kabupaten Kaimana setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu di tahun 2016 berada di angka 62,15% dan terus naik hingga angka 65,00% di tahun 2020 dan mempunyai rata IPM yaitu 63,63%. Hal ini menunjukkan tren yang positif tetapi angka ini masih berada ditingkat menengah yang mana perlu ditingkatkan lagi dan jika melihat kondisi di lapangan pemerintah daerah masih perlu pembenahan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah. Sama halnya dengan temuan Pangaribuan bahwa Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) (Pangaribuan, 2020).

Selanjutnya Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 masih sangat rendah sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat. Seperti temuan Oki bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).

Temuan Hamid yaitu terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan perkapita, terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Layaknya penelitian tersebut kemandirian keuangan daerah mempunyai peran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54%, sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan

bergantung pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Dengan memanfaatkan sumber-sumber potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga daerah tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer atau pendapatan eksternal dalam membiayai jalannya pemerintahan di daerah Kabupaten Kaimana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kaimana sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis, serta terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan hingga terselesaikannya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Alhusain, A. S., dkk. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amin, F. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggito, A. dan J. Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Berliani, K. 2016. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka". *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2), 121–144.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A. A. 2018. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat". *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 38–51.
- Hutabarat, F. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Publisher.

- Indrayanti, W. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau Tahun 2008-2017”. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 353–363.
- Jaya, I. M. L. M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kariyoto. 2017. *Analisa Laporan Keuangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khusaini, M. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- , 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2021. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, D. A. D. 2018. “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Primanto, A. 2020. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. 2018. “Analisis kemandirian keuangan daerah”. *Inovasi*, 13(2), 92.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sibarani, E. M. 2018. “Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara”, *Universitas Sumatera Utara Skripsi*, 44–48.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , Marja. dan H. M. Panjaitan. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahmat: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sudaryo, Y., dkk. 2021. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syahputra, R. 2017. “Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang”. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.
- Tersiana, A. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Tohardi, A. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Wasistiono, Sadu dan F. Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Wulandari, P. A. dan E. Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Zaman, N., dkk. 2021. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

